



Buletin Parlementaria

Nomor 1216/II/IX/2022 • September 2022



'P20 Friendship Ride & Run' Sebagai Semangat Sukseskan P20



3 Marak Demo
Kenaikan BBM,
Puan Maharani:
DPR Akan Akomodir
Aspirasi Masyarakat



7 Rachmat Gobel:
Menjadi Wakil
Rakyat Harus
Terus Berjuang
Demi Rakyat



9 772614 339005



'P20 Friendship Ride & Run'

Sebagai Semangat Sukseskan P20



FOTO: RUMI/ANS

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat mengikuti acara 'P20 Friendship Ride & Run'.

DPR RI menyelenggarakan acara 'P20 Friendship Ride & Run' dalam rangka menyambut pelaksanaan Parliamentary Speakers's Summit 20 (P20) yang merupakan bagian dari Indonesia sebagai keketuaan G20. Sesuai tajuk acara, kegiatan ini diisi dengan lomba lari sejauh 3 kilometer (km) dan 7,7 km serta sepeda santai dengan jarak 17,7 km. Acara ini juga menjadi bagian dari semangat untuk menyukseskan P20 pada 5-7 Oktober 2022 mendatang.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSA) Gilang

Dhielafararez dan Anggota DPR RI Kamrussamad, Sondang Tiar Debora Tampubolon, Rusda Mahmud, dan Harris Turino. Turut hadir, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono, Plt Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihatini, beserta jajaran pejabat dan staf Setjen DPR RI.

"Pada hari ini, menyambut pelaksanaan kegiatan P20, acara 'P20 Friendship Ride & Run' hari ini menjadi bagian dari semangat untuk menyukseskan pertemuan P20 yang merupakan rangkaian G20 yang akan datang. Dimana kita berharap, masyarakat, Anggota DPR dan semua bisa mensosialisasikan terkait pentingnya acara 'The 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit' yang Insya Allah akan dilaksanakan

pada 5 sampai 7 Oktober 2022 di Jakarta," kata Gus Muhaimin dalam sambutannya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (4/9).

Dengan mengambil tema '*Stronger Parliament for Sustainable Recovery*' P20 memiliki beberapa isu prioritas yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomi hijau, juga tantangan yang terkini yaitu ketahanan pangan dan energi serta tantangan ekonomi. Kemudian beragendakan upaya parlemen, untuk secara efektif memperkuat demokrasi dan untuk tujuan inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Isu-isu tersebut selaras dengan agenda dan pembahasan G20 yang mencakup tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

"Hadirin-hadirin sekalian, suksesnya pertemuan P20 pada Oktober nanti, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pemerintah beserta seluruh masyarakat Bangsa Indonesia untuk bisa menyukseskan Indonesia menjadi tuan rumah yang berhasil dalam pelaksanaan G20 dan P20. Oleh karena itu, saya berharap peran serta dari seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan P20 dalam rangkaian kesuksesan G20," pungkasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut berharap acara P20 akan berjalan dan dapat membangun citra positif bagi bangsa Indonesia. Serta memberikan sumbangsih bagi Indonesia untuk *me-recover* keadaan, terutama mengatasi krisis ekonomi pasca Covid-19, dan juga ingin terus memperkokoh, memperkuat, kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif bagi upaya penguatan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Kesuksesan pelaksanaan P20 nantinya juga dapat menjadi batu loncatan untuk Indonesia terus memperjuangkan berbagai kepentingan nasional pada level tingkat global. ● gal/sf

Scan QR untuk berita selengkapnya



Marak Demo Kenaikan BBM, Puan Maharani: DPR Akan Akomodir Aspirasi Masyarakat



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

FOTO: JAKA/NVL

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyatakan pihaknya akan mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan Gerbang DPR RI, pada Selasa (6/9), terkait kebijakan kenaikan BBM melalui komisi-komisi terkait untuk kemudian dibicarakan kepada pemerintah.

"Sampai saat ini, kami akan lihat dulu. Namun dari pernyataan atau aspirasi yang disampaikan, kami akan mengakomodir aspirasi tersebut dan nanti akan kami sampaikan melalui

komisi-komisi untuk dibicarakan dengan pemerintah," ujar Puan usai Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-77 DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Puan menyatakan, DPR RI mendengar aspirasi masyarakat terkait kenaikan BBM dan hal ini menjadi satu hal yang akan diperhatikan DPR RI. "Tentu saja kami akan mendengar dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah, dan kami meminta pemerintah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit," tutur Puan.

Terkait kenaikan BBM, pemerintah memberikan tiga bantuan sosial, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan Angkutan Umum. "Kami berharap bahwa (bantuan sosial) itu akan bisa tepat sasaran, kemudian akan berguna bagi masyarakat. Dalam pemberiannya tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan, kemudian salah nama atau salah sasaran atau salah alamat. Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya," harap Puan. • **gal,adi/sf**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos, (Kasubag Media Cetak dan Website)

Suciati, S.Sos, (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos, (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destiantil, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubald Faurizat, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Inandi, Surahmat Eko Budi Setiantio, Taufan Syahrull, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Fista Dysie, Balggus Maeshyntha, Anju Alfonce Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiatl, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldil Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciiani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Laporkan Kinerja Dewan di HUT ke-77, Puan Maharani Paparkan RUU yang Berhasil Diselesaikan



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 DPR RI.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengungkapkan selama satu tahun sidang, yakni pada Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan 32 Rancangan Undang-Undang (RUU). DPR RI juga terus berupaya bekerja dengan menganut prinsip transparansi publik.

"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan 32 Rancangan Undang-Undang (RUU)," kata Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Dilanjutkannya, beberapa RUU yang berhasil dihasilkan DPR pada Tahun Sidang 2021-2022 sesuai dengan program legislasi nasional (Prolegnas) di antaranya UU tentang Ibu Kota Negara, UU tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kemudian UU tentang Keolahragaan, UU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, UU tentang Pemasarakatan, UU Kejaksaan dan UU tentang pembentukan provinsi serta UU Pengadilan Tinggi sejumlah daerah.

Selain itu, lanjutnya, DPR juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang sangat penting sebagai dasar hukum dalam pembentukan undang-undang dengan model *omnibus law*.

DPR RI pun telah menghasilkan sejumlah RUU penyesuaian dasar hukum berbagai provinsi yang sebelumnya masih berlandaskan

Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat). DPR juga menyelesaikan RUU pembentukan daerah otonomi baru untuk 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan sebagai instrumen hukum dalam mempercepat pembangunan wilayah NKRI.

"Ke depan, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan Rancangan Undang Undang yang terdapat dalam Prolegnas Prioritas 2022, baik dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I maupun tahap penyusunan di DPR RI," terang politisi PDI-Perjuangan ini.

Puan juga menambahkan, pembentukan UU merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dengan Pemerintah. Oleh karena itu, kata Puan, diperlukan komitmen bersama antar pembentuk UU, yaitu DPR RI dan Pemerintah, dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. ● **ayu/aha**

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2021 Jadi UU



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima laporan pembahasan RUU P2 APBN 2021 dari Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie pada Rapat Paripurna DPR RI.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI secara resmi melaporkan bahwa seluruh fraksi menyetujui atau menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan

menjadi Undang-Undang (UU).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2021, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

"Fraksi PDI-Perjuangan,

Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP menyetujui atau menerima RUU menyetujui atau menerima RUU tentang RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU," ujar Syarif.

Lebih lanjut, sambung Syarif, Fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan *minderheidsnota* RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

"Demikian laporan Banggar DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 untuk dapat diambil keputusan dalam Sidang Dewan yang terhormat ini," pungkasnya.

Usai memberikan laporan tersebut, pimpinan rapat paripurna Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta persetujuan kepada peserta rapat soal keputusan RUU Pertanggungjawaban APBN 2021 menjadi UU. Peserta rapat paripurna kali ini sontak menjawab setuju dan palu pun diketuk menandakan sahnyanya rancangan beleid itu menjadi UU. ● pun/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dukung Penguatan Kerja Sama Perdagangan Regional, DPR Setujui RUU RCEP Menjadi UU

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang terkait pengesahan *Regional Comprehensive*

Economic Partnership Agreement (RCEP) pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). Perjanjian RCEP merupakan kesepakatan kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara dan Negara Mitra dalam hal ekonomi dan perdagangan.

"Sidang dewan yang terhormat, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Lodewijk Freidrich Paulus, saat memimpin rapat.

Pertanyaan yang dilontarkan Lodewijk tersebut langsung dijawab 'setuju' oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir. Ketukan palu sidang oleh pimpinan rapat sesaat setelah persetujuan diberikan oleh para Anggota menjadi tanda bahwa RUU tentang pengesahan RCEP telah sah menjadi Undang-Undang.

Sebelum pengesahan RUU, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima melaporkan mengenai hasil pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang pengesahan RCEP yang telah dilakukan oleh Komisi VI DPR RI dan perwakilan pemerintah. Aria Bima melaporkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia



FOTO: OLI/PTT

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus saat menerima dokumen pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait pengesahan RCEP dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.

Scan QR untuk berita selengkapnya



dengan negara-negara ASEAN dan 5 mitra ASEAN tersebut ditujukan untuk mendukung program pembangunan ekonomi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Dalam rangka mendukung program pembangunan ekonomi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah RI bersama pemerintah anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya, serta pemerintah negara Australia, Jepang, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok dan Selandia Baru telah menandatangani *Regional Comprehensive Economic Agreement* pada tanggal 15 November 2020 dan untuk pemerintah Indonesia penandatanganan dilaksanakan di Bogor, Indonesia," kata Aria Bima.

Pembahasan terkait RUU dengan pemerintah tersebut telah dimulai pada 5 Juni 2022 lalu bersama Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Luar Negeri. Tahapan selanjutnya dalam perjalanan RUU tersebut adalah pembahasan materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) haryang terdiri dari 16 DIM batang tubuh dan 19 DIM penjelasan RUU RCEP.

"Dari beberapa DIM yang dibahas terdapat 1 perubahan pada batang tubuh yaitu DIM nomor 16 berkaitan dengan pengundangan Undang-Undang yang sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM menjadi Menteri Sekretaris Negara, sesuai amanat perubahan kedua Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," jelas politisi PDI-Perjuangan itu. ● uc/sf



FOTO: AZKA/NVL



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menerima alumni Parlemen Remaja Tahun 2019, 2020 dan 2021.

Rachmat Gobel: Menjadi Wakil Rakyat Harus Terus Berjuang Demi Rakyat

Tugas menjadi seorang anggota dewan tidaklah mudah. Wakil rakyat berkomitmen dan konsisten memperjuangkan aspirasi serta harapan rakyat. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berharap, ada di antara Alumni Parlemen Remaja (Parja) yang menjadi penyambung

lidah rakyat yang memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat di masa mendatang.

"Suatu kebanggaan saya bisa bertemu dengan parlemen muda, Insya Allah adik-adik semua bisa menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen nanti," ucap Gobel kepada Alumni Parja 2019, 2020 dan 2021 di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Kepada 15 Alumni Parja yang hadir menemuinya, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini lebih banyak berbagi cerita tentang dunia keparlemenan. Dimana, Anggota DPR RI selalu dituntut untuk mendengar, memperjuangkan dan memenuhi aspirasi rakyat.

"Perjuangan bisa macam-macam caranya, di sinilah kata hati kita berbicara. Namanya juga menjadi wakil rakyat, *goals* dari perjuangan kita adalah kesejahteraan rakyat. Kita harus berpikir ke sana," ucap politisi Partai NasDem tersebut.

Menurut Anggota Dewan dapil Gorontalo ini, hal paling indah bagi seorang wakil rakyat adalah ketika dapat berjuang dan dapat memenuhi harapan-harapan rakyat. "Senyum rakyat adalah kebahagiaan kita (wakil rakyat). Ini adalah bagian dari ibadah saya, perjuangan untuk membangun rakyat Indonesia," tutup Gobel. • **adi/aha**

Kemajuan BSSN Perlu Dukungan Anggaran dari Pemerintah

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, untuk kemajuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), perlu adanya dukungan terhadap kemuktahiran alat serta kemampuan untuk mampu memonitoring anomali *traffic* di ruang siber. Kecerdasan alat dengan teknologi terbaru sangat penting untuk meng-*update* kemampuan mendeteksi serangan-serangan tersebut. Guna mendukung semua itu, perlu adanya dorongan dalam peningkatan anggaran. Komisi I DPR RI berharap adanya *political will* dari pemerintah.

"Kita berharap dengan adanya *political will* dari pemerintah, (anggaran) daripada BSSN bisa ditingkatkan. Agar kemajuan teknologi dan kemampuan negara dalam mendeteksi serangan-serangan bisa jauh lebih baik dari hari ini," kata Meutya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dalam rangka *monitoring* program penanganan siber menghadapi Pilpres dan Pileg tahun 2024, di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/9).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dalam kurun waktu satu minggu hingga dua minggu ke belakang, Komisi I DPR RI telah membaca di media massa banyak sekali serangan-serangan yang ditujukan kepada lembaga, kementerian maupun perusahaan terkait perlindungan data. Untuk itu Komisi I hadir guna melihat sejauh mana peran BSSN dalam mengamankan data-data



FOTO: RUMI/NVA

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin Kunspek Komisi I DPR RI ke Kantor BSSN.

pasalnya perlindungan data menjadi sangat penting.

"Kita melihat bagaimana peran BSSN bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk menjaga, sekaligus mengawal deteksi-deteksi awal terhadap

serangan-serangan yang terjadi. Agar lembaga, kementerian maupun perusahaan bisa mengantisipasi, meminimalisir serangan yang masuk," pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu. • rni/sf

Scan QR untuk berita selengkapanya



Komisi I Apresiasi Layanan Kesehatan RSAU TNI dr. M. Salamun

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan bersama Anggota Komisi I DPR RI lainnya meninjau fasilitas kesehatan Rumah Sakit milik TNI Angkatan Udara, RSAU Salamun. Ia mengapresiasi pelayanan kesehatan rumah sakit kelas A

di Kota Bandung ini. Keberadaan RSAU Salamun sangat penting dalam memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak hanya untuk prajurit TNI tetapi juga bagi masyarakat umum.

"Nah, peran-peran inilah yang sangat kita nantikan karena di RS TNI biasanya memiliki standar yang lebih tinggi daripada RSUD, karena

Komisi I Dukung Pemenuhan Sarpras Lanal Banten

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono melihat perlu adanya pembahasan lanjutan terkait

penambahan alutsista, dukungan jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana lainnya di Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten. Rencananya hal tersebut akan dibahas dalam rapat dengan Kemenhan, Kominfo, Markas Besar TNI AL dan mitra kerja terkait.

Demikian diungkapkan Bambang usai memimpin Rapat Dengar Pendapat antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Komandan Lanal Banten Letkol Laut (P) Dedi Komarudin beserta jajaran Lanal Banten, di Cilegon, Banten, Jumat (2/9/2022).

"Saya kira apa yang kami

terima di paparan sekaligus bisa mengenali dan memahami sampai sejauh mana kekurangan dan kendala serta masalah yang dialami Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten.



FOTO: BUNGA/NVL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono saat memimpin Tim Kunspek Komisi I DPR RI ke Lanal Banten.



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan.

FOTO: ANNE/NVL

KEBERADAAN RSAU SALAMUN SANGAT PENTING DALAM MEMUDAHKAN WARGA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN.

itu keberadaan rumah sakit ini jadi sangat penting," jelas Farhan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke RSAU dr. M. Salamun di Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/9). Komisi I DPR RI diterima Kepala RS TNI RSAU Salamun, Aplin Ismunanto.

Karena selain sarana dan prasarana seperti alutsista, juga ternyata alat (jaringan) komunikasi juga masih jadi keprihatinan kita bersama," jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Pemenuhan sarpras di Lanal Banten dinilai sangat penting karena jalur Lanal Banten dilintasi oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI 1) dimana Selat Sunda dijadikan sebagai jalur alternatif yang memainkan peranan penting. "Ada sebanyak 8000 kapal dalam sebulan atau sekitar 300 kapal dalam sehari yang melintas. Ini potensi, juga kerawanan," tegasnya. • **blf/sf**

Kendati demikian, Farhan menyebutkan masih ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi RSAU Salamun, di antaranya terkait tenaga kesehatan yang masih didominasi Tenaga Kerja Kontrak, rendahnya honor tenaga kerja kontrak hingga masalah status kepemilikan lahan. Farhan menyampaikan Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertahanan.

"Memang ada beberapa kendala dan kendala tersebut itu akan kita komunikasikan dalam rapat kerja. Kita mendorong agar para tenaga kesehatan honorer bisa ditingkatkan statusnya," imbuh politisi Partai NasDem ini. • **ann/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Terima Aspirasi Satpol PP, Komisi II Akan Inisiasi Pansus Untuk Honorer

Komisi II DPR RI akan membentuk pansus soal permasalahan honorer yang melibatkan komisi lain di DPR. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat menerima Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) terkait aspirasinya untuk diangkat menjadi PPPK. Komisi II pun menegaskan, untuk terus bekerja maksimal menampung aspirasi dari masyarakat.

"Kami sepakat akan membentuk pansus untuk honorer. Sebab berkaca pada UU Otsus di Papua, bahwa umur 40-45 tahun bisa menjadi ASN. Itu jadi salah satu contoh. Untuk para honorer, kita tunggu dari pemerintah, apakah anggaran cukup. Walaupun anggaran diketuk di DPR, tapi kan eksekutornya itu pemerintah. Kami harap bisa bekerja maksimal dalam rangka memenuhi hak-hak dan aspirasi bapak-ibu sekalian," papar Junimart dalam RDPU Komisi II DPR RI dengan FKBPPPN di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Dalam kesempatan itu, politisi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan, sebelum kedatangan FKBPPPN ke DPR, pihaknya juga sudah menerima aspirasi serupa dari tenaga honorer Satpol PP di Siantar, Sumatera Utara. Ketika itu Junimart mendapati informasi, pengangkatan Satpol PP selama ini dilakukan Bupati. Itu ibarat bom waktu yang diberikan Bupati untuk DPR, khususnya Komisi II. Junimart mengungkapkan akan memperjuangkan aspirasi tersebut melalui pansus Honorer yang akan dibentuk Komisi II DPR RI.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa sejatinya sebelum FKBPPPN datang ke DPR, Komisi II DPR sudah punya inisiatif akan membentuk pansus honorer. Ia juga berjanji akan ikut memperjuangkan aspirasi tersebut, yang akan dikordinir langsung oleh Pimpinan DPR dengan melibatkan komisi-komisi terkait lainnya. • **ayu/aha**



FOTO: ARIEF/NVI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Komisi II DPR RI menerima audiensi FKBPPPN.



Kunjungi Polda Kalsel, Kasus Sarijan dan Subhan Jadi Perhatian Komisi III

Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh melaksanakan kunjungan kerja spesifik (Kunspek) ke Polda Kalimantan Selatan (Kalsel). Tim Kunspek diterima langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikhwanto di Mapolda Kalsel, Banjarmasin, Jumat (2/9). Ada dua kasus yang dielaborasi komisi bidang hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanan itu di Polda Kalsel yaitu kasus meninggalnya Sarijan dan Subhan.

Dua kasus yang jadi perhatian Komisi III DPR RI adalah meninggalnya Sarijan (60 tahun). Warga Jalan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, usai diduga dianiaya petugas dari Satres Narkoba Polres Banjar pada tahun 2021 lalu. Kemudian, kasus meninggalnya Subhan (32 tahun), warga Pekapuran, Banjarmasin Tengah. Subhan diamankan polisi, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2022 ini di RS Bhayangkara Banjarmasin.

"Kami meminta kepada Kapolda Kalsel untuk betul-betul melihat dalam penyidikannya nanti. Untuk enam tersangka (anggota Polres Banjar) terkait tewasnya Sarijan, apabila dari mereka melanggar standar operasional prosedur (SOP). Kapolda Kalsel jangan ragu-ragu ambil tindakan kepada aparat yang melanggar," ujar Pangeran.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikhwanto dalam paparannya menjelaskan, kasus Sarijan merupakan daftar pencarian orang



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda Kalsel.

(DPO) sejak 2021. Diketahui Sarijan bersama anaknya merupakan pengedar narkoba. "Anaknya sudah ditangkap dan diproses di Polsek Banjarmasin Tengah. Kemudian divonis 7 tahun penjara," kata Rikhwanto.

Lebih lanjut Rikhwanto menjelaskan, saat itu Sarijan belum ditangkap. Hingga pada

Januari 2022, Sarijan kemudian ditangkap. "Dalam penangkapan terjadi perlawanan dan akhirnya Sarijan mendadak lemas langsung dibawa ke klinik dan dinyatakan meninggal dunia. Situasi yang terjadi memang tak diinginkan penyidik dari Satres Narkoba Polres Banjar, karena apa pun bisa terjadi," ungkap Rikhwanto kepada Komisi III.

"Terkait anggota kami yang melakukan tindakan penangkapan, kami kategorikan *offside* atau melebihi dari tindakan yang seharusnya. Makanya, kami akan lakukan penegakan hukum," kata Rikhwanto. Dia menegaskan Polda Kalsel juga telah membentuk tim penyidik, sehingga berkas perkara bagi oknum polisi yang sudah selesai bisa segera dilimpahkan ke kejaksaaan. • man/aha

”

**KAMI MEMINTA
KEPADA KAPOLDA
KALSEL UNTUK
BETUL-BETUL
MELIHAT DALAM
PENYIDIKANNYA
NANTI.**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Jalankan Fungsi Pengawasan, Komisi IV Tinjau Perusahaan Batu Bara di Kutai Barat

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke perusahaan pertambangan

batu bara, PT Kedap Sayaaq (KS) di Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (3/9). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu mengungkapkan, kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut merupakan implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI.

Secara rinci, Rusdi menyatakan kunjungan digelar dalam rangka pembuktian di lapangan berkaitan benar atau tidaknya dugaan terdapat kegiatan penambangan sebagaimana aduan dan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Komisi IV DPR RI tentang penggunaan kawasan hutan ditambang tanpa lengkap dengan dokumen oleh PT KS.

"Kami menindaklanjuti aduan dan laporan yang masuk ke Komisi IV DPR RI tentang penggunaan kawasan hutan ditambang tanpa lengkap dengan dokumen. Oleh karena itu, kami datang di lapangan membuktikan bahwa apakah benar ada kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Rusdi, di Kutai Barat, Kaltim.

Ternyata, Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani yang turut hadir menemukan adanya pelanggaran di lapangan dan menyetel kegiatan PT KS. Mengenai

penghentian dan penyegelan itu, diketahui merupakan kewenangan dari Kementerian KLHK. Sementara pihak perusahaan dikabarkan keberatan terhadap upaya KLHK

tersebut. "Saran kami, pihak perusahaan buat surat saja ke KLHK kalau memang keberatan. Jangan menghalang-halangi. Lakukan sesuai ketentuan," terang Rusdi. • **pun/aha**



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu saat memimpin kunspek ke PT Kedap Sayaaq.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi IV Dorong KKP Tangani Alih Fungsi Pelabuhan Tegal Sari

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanes Fransiskus Lema menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI akan mendorong jajaran Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) untuk segera turun tangan dalam mengambil alih fungsi di Pelabuhan Tegal Sari, di Kota Tegal, Jawa Tengah.

Demikian diungkapkan Ansy Lema, sapaan akrabnya, usai mengikuti pertemuan Tim



Komisi IV Apresiasi Penanganan PMK Zero Case di Sumsel



Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan saat memimpin kunspek Komisi IV DPR RI ke Barantan Palembang.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian serta Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan (PKH) yang telah menangani ribuan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan kini sudah dinyatakan *zero case*.

"Artinya sudah tidak ada lagi data yang dilaporkan terkait kasus PMK ini. Kesemuanya karena gerak cepat dan tepat sasaran

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait di Pelabuhan Tegal Sari, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (2/9).

"Salah satu aspirasi yang kami terima dari nelayan-nelayan, yaitu mengenai adanya keterbatasan di Pelabuhan Tegal Sari. Maka, kami ingin mendorong KKP untuk segera turun tangan terhadap alih fungsi pelabuhan Tegal Sari terkait pelebaran pelabuhan mengingat demikian *crowded*-nya kapal-kapal yang masuk di pelabuhan ini," ungkap Ansy Lema.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, Komisi IV DPR RI juga menerima aspirasi dari para nelayan mengenai kemungkinan terjadinya kebakaran di pelabuhan

dan sekitarnya. Menanggapi hal tersebut, Ansy Lema berharap KKP dapat memenuhi kebutuhan nelayan dengan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran di setiap pelabuhan.

"Kita (Komisi IV) berharap adanya perhatian dengan menghadirkan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran. Sehingga menjadi antisipasi bagi setiap kapal-kapal yang berlabuh. Semacam sistem *hydrant* yang wajib di setiap pelabuhan untuk mempermudah aksi cepat tanggap darurat jika terjadi kebakaran," imbau Ansy Lema. ●

mcn/sf

serta yang paling penting adalah berkolaborasi membangun sinergi dan bergotong royong dari semua stakeholders yang ada di Sumsel untuk menangani PMK secara bersama-sama," kata Johan saat memimpin rapat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, Sumsel, Jumat (2/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pihaknya mengaku *surprise* atas penyampaian Kepala Badan Karantina Pertanian bahwa PMK di Sumsel sudah *zero case*. "Keberhasilan ini patut kami apresiasi dan akan kami bawa ke Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Pemerintah untuk dijadikan contoh bagi daerah lain," kata Johan lebih lanjut.

Hal tersebut juga disampaikan Kepala Badan Karantina Kementan, Bambang yang mengatakan dengan kondisi *zero case* PMK menjadikan Sumatera Selatan kembali menjadi zona hijau. Ia berharap penanganan PMK di Sumatera Selatan dapat ditiru oleh provinsi lainnya sehingga kondisi Indonesia semakin baik. ● **cas/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Anggota Komisi IV DPR RI Yohanes Fransiskus Lema.

FOTO: MUNCHEN/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Komisi V Komitmen Bantu Wujudkan Akses Jalan di Daerah

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengungkapkan, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (UU Jalan), APBN tidak bisa digunakan membiayai jalan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan desa). Saat itu pembiayaan jalan daerah dengan APBN hanya bisa dilakukan jika ada diskresi yang dikeluarkan oleh menteri atau presiden.

Hal tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Forkopimda Bengkulu, para Bupati/Wali Kota se-Bengkulu di Balai Semarak, Bengkulu, Jumat (2/9). Serap aspirasi ini turut dihadiri para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Dulu saat pembahasan UU Jalan ini, kita berdebat panjang dengan Kementerian Keuangan. Karena mereka tidak mau dan takut ada perubahan dalam anggaran. Tapi kami berkomitmen, bagaimana agar jalan kabupaten/kota, jalan provinsi bahkan jalan desa yang tidak mampu dikerjakan daerah dengan kemampuan APBD, maka dikerjakan oleh APBN," terang Ridwan.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, rata-rata tingkat pemanfaatan jalan nasional di seluruh Indonesia sudah lebih dari 90 persen. Sementara jalan provinsi, pemanfaatannya sekitar 60 persen sedangkan jalan kabupaten pemanfaatannya lebih dari 40 persen. "Maka jadi penting UU Jalan

ini kita lanjutkan yang pada akhirnya jalan kabupaten/kota, provinsi bahkan sebagian desa, utamanya jalan poros atau penghubung, juga bisa dibiayai oleh APBN," ungkapnya.

Ia meminta kesediaan *stakeholder* di Bengkulu mulai dari kepala balai di bawah naungan Kementerian PUPR, pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk saling bersinergi dalam menyusun dan melengkapi ketentuan dasar yang dibutuhkan sebagai

bahan pengajuan pembangunan jalan. Di antaranya, rencana anggaran biaya (RAB), pembebasan lahan, dan lainnya menjadi aspek pertama yang dinilai dan harus segera disiapkan pemda.

● es/aha



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae.

Foto: Erman/nvl

Scan QR untuk berita selengkapnya



Novita Wijayanti Dukung Percepatan Pembangunan ITERA

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti melihat adanya potensi luar biasa dalam hal konsep pembangunan yang diusung oleh Institut Teknologi Sumatera (ITERA), di Lampung Selatan, Lampung. Ia mengatakan,

untuk mencapai target yang dituju, Universitas tersebut mutlak memerlukan dukungan baik itu berupa anggaran yang mencukupi.

Melihat kebutuhan anggaran yang begitu besar, ia mengusulkan agar ITERA dapat turut mencari alternatif sumber dana pembangunan. "Kita minta

Komisi V Soroti **Persoalan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di DIY**



Foto bersama Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan jajaran Pemkab Sleman dan mitra kerja terkait.

Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur dan fasilitas transportasi sebagai sarana dan prasarana penunjang mobilitas masyarakat di Kabupaten Sleman dan sekitarnya terkait kebutuhan infrastruktur. Wakil

Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha menekankan, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita semua yakin bahwa ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta pemerataan hasil pembangunan

demi kesejahteraan masyarakat," ungkap Tamliha dalam sambutannya di hadapan Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (2/9).

Oleh karenanya, politisi PPP ini berharap pemerintah dapat bergerak cepat dan berinovasi, khususnya dalam bentuk program-program kerja seperti percepatan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Padat Karya. "Nantinya diharapkan masyarakat setempat bisa memperoleh penghasilan dan distribusi perputaran uang kedepannya bisa menumbuhkan peningkatan ekonomi yang pertumbuhannya lebih baik," jelas Tamliha lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi V DPR RI. "Kami sangat senang sekali jajaran Komisi V DPR RI memberikan perhatian kepada kami khususnya dalam kunjungan ini. Terutama karena Kabupaten Sleman merupakan lokus dari 3 Trase Proyek Strategis Nasional Jalan Tol, yaitu Jogja-Solo, Jogja-Bawen, dan Jogja-YIA," tutur Danang. ● **tra/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



itu untuk mencari, tidak hanya mengandalkan APBN, bisa dari swasta kemudian dari sektor-sektor lainnya," ucapnya saat mengikuti Kunspek Komisi V DPR RI ke ITERA, Lampung, Jumat (2/9).

Politisi Partai Gerindra itu menyadari, untuk mengejar percepatan pembangunan sarana dan prasarana, ITERA memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Hal itu pun menjadi perhatian Komisi V DPR untuk turut berperan serta dalam memberi dukungan terhadap ITERA.

"Kita ke sini dalam rangka mendukung bagaimana proses pembangunan sarana dan



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti.

prasarana dari ITERA ini termasuk keperluannya," kata Novita sembari

berharap ITERA membentuk generasi muda unggul. ● **srw/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemerintah Harus Jaga Ketahanan Energi

Pemerintah diserukan menjaga ketahanan energi, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ini penting diperhatikan agar tak terjadi krisis energi ke depan, seperti menimpa Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan, akibat tak memiliki ketahanan energi dan pangan.

Demikian siaran pers oleh Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer yang diterima **Parlementaria**, Senin (5/9). Selain energi, ketahanan pangannya juga perlu dijaga. Aktivitas impor yang tinggi harus jadi perhatian pula bagi pemerintah. Ia melihat, sektor energi dan pangan bisa mengalami guncangan hebat di masa depan, bila impor kedua sektor itu tak dijaga oleh pemerintah.

"Kita melihat ketahanan pangan dan energi masih banyak yang impor. Saya melihat kondisi kita yang terjadi saat ini dan berpotensi memburuk ke depan adalah masalah ketahanan pangan dan energi. Kedua hal itu akan menjadi substansi pokok ke depan. Inilah tugas dari KPPU, BSN, BPKS, dan BP Batam untuk mengawasi masuknya arus barang impor dan menggenjot ekspor. Untuk itulah badan-badan ini dibentuk," jelas Demer.

Dikatakan legislator asal Bali ini, banyak negara jatuh, berawal dari ketahanan energinya yang lemah. Pandemi yang tak berkesudahan disusul perang Rusia-Ukraina, menyebabkan ketahanan energi di sebagian negara berkurang. Harga energi sangat mahal. Sementara ekspor neraca perdagangan

”

SEKTOR ENERGI DAN PANGAN BISA MENGALAMI GONCANGAN HEBAT DI MASA DEPAN, BILA IMPOR KEDUA SEKTOR ITU TAK DIJAGA.

mereka minus tidak bisa pinjam dana ke mana pun dan akhirnya tidak bisa impor energi. Pada gilirannya, negara itu pun runtuh.

"Itu hal biasa karena

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih.

begitu perekonomiannya jatuh, pemerintahannya juga ikut jatuh, baik itu negara demokratis maupun negara otokratis. Di Sri Lanka, misalnya, harga sepeda tiba-tiba naik lima kali lipat. Mobil sudah tidak bisa digunakan, karena tidak bisa impor minyak. Negaranya sudah tidak bisa pinjam uang kemana-mana, lalu tidak bisa beli energi untuk bahan bakar," tambah Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut.

Pemerintah, lanjut Demer, harus didorong menciptakan surplus perdagangan lewat empat badan tersebut di atas. Dengan produksi surplus berarti bisa melakukan ekspor. "Saya berharap dengan perdagangan yang surplus kita masih dipercaya banyak negara," tutup Demer. • **mh/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: OJI/NVL

BBM Naik, Diah Nurwitasari: Pemerintah Dianggap Tak Dengar Suara Rakyat



FOTO: PRIMAZ/NVL

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari saat menemui unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR RI yang menolak kenaikan harga BBM.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kritik kembali disuarakan merespon kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah.

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai pemerintah ternyata tidak mendengarkan suara rakyat. Menurutnya, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang baru saja bangkit pasca-pandemi Covid-19. Kenaikan ini sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian pemerintah atas derita rakyat kecil.

"Innalilahi Wa Inna ilaihi Roojiuun. Pemerintah benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat. Pemerintah benar-benar tidak peduli lagi dengan kondisi masyarakat. Ini

”

PEMERINTAH BENAR-BENAR TIDAK MENDENGARKAN SUARA RAKYAT. PEMERINTAH BENAR-BENAR TIDAK PEDULI LAGI DENGAN KONDISI MASYARAKAT.

sangat bertolak belakang dengan jargon pemerintah 'Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat'. Ternyata yang dilakukan pemerintah malah menambah beban rakyat," ungkap Diah lewat keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Sabtu (3/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) ini menambahkan, sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM bersubsidi. "PKS sendiri sudah sering memberikan masukan kepada pemerintah termasuk salah satunya pembatasan. Pembatasan di sini maksudnya pengetatan dan pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi," urai legislator dapil Jawa Barat II itu.

Diah melanjutkan, kenaikan BBM bersubsidi ini merupakan musibah bagi kita. Pemerintah hanya mencari jalan cepat tanpa memperhatikan masyarakat. "Kami berharap apa yang dilakukan pemerintah ini benar-benar sudah dihitung dengan matang, karena dampak ikutannya sangatlah berat," tutup Diah. • **mh/aha**

Komisi IX Apresiasi Keberhasilan Vaksinasi di Yogyakarta



FOTO: SINGIH/NWI

Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena

menilai pelaksanaan vaksinasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah berjalan sangat baik. Baik itu vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin *booster* pertama dan menuju vaksin *booster* kedua saat ini, jika dibandingkan dengan pencapaian vaksinasi secara nasional, angka pencapaian vaksinasi di DIY sudah melebihi nasional.

"Kerja sama dari semua pihak khususnya dari kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang berjalan dengan baik sehingga capaian vaksinasi di DIY menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia di bawah DKI Jakarta dan Bali. Ini membuktikan bahwa kerja sama antar semua pihak bisa mempercepat agenda vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah," ungkap Melki, di Gedhong

Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (2/9).

Lebih lanjut Melki menyampaikan, pengalaman DIY dalam pelaksanaan

vaksinasi bisa dipelajari dan diadopsi untuk daerah lain sesuai dengan kondisi lokalnya masing-masing. "Yang terpenting adalah kerja sama dari semua pihak, saya rasa ini bisa dilakukan dan ini juga bisa diterapkan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin *booster*," ungkapnya.

Merujuk pada data yang disajikan Pemprov DIY, bahwa capaian vaksinasi di DIY dari total sasaran 3,1 juta lebih penduduk, telah tercapai 107,47 persen untuk dosis satu dan 99,71 persen untuk dosis kedua. Sementara untuk vaksinasi *booster* satu baru tercapai 40,93 persen. Sedangkan untuk vaksin *booster* dua khusus untuk tenaga kesehatan tercapai 62,29 persen dari jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang ada di DIY. • skr/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Itet Tridjajati Usul Pembangunan Makam Pahlawan Kemanusiaan

Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumariyanto mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membangun Makam Pahlawan Kemanusiaan yang diperuntukkan untuk para

pahlawan kemanusiaan dalam hal ini para tenaga kesehatan yang telah gugur dalam berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

"Saya berharap untuk segera dibangun Makam Pahlawan Kemanusiaan untuk para tenaga kesehatan yang gugur dalam

Komisi IX Nilai Pemprov NTB Telah Maksimal Capai Target Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target vaksinasi Covid-19 sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat, guna memberikan perlindungan kepada masyarakat di NTB. Kurniasih juga menyampaikan, capaian target tersebut tidak mudah, karena banyak tantangan dan hambatan dalam menjalani program vaksinasi Covid-19.

"Tantangannya memang agak berat, tapi capaian dari target vaksinasi Covid-19 harus terus



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memimpin Kunspek Komisi IX DPR RI ke NTB.

ditingkatkan, khususnya *booster*. Kami terus mendorong Pemda NTB dan juga masyarakat setempat untuk terus mengikuti program vaksinasi Covid-19, termasuk vaksinasi dosis ketiga hingga keempat," ujar

Kurniasih dalam sambutannya pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemrov NTB, di Mataram, Jumat (2/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memaparkan bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dari Komisi IX DPR terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kurniasih menekankan, hingga saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Ia juga meminta Pemrov NTB dapat lebih berhati-hati terhadap keberadaan vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa.

Kurniasih menegaskan agar Pemda NTB tidak menggunakan vaksin Covid-19 kedaluwarsa, meskipun masih memungkinkan untuk dilakukannya perpanjangan waktu. "Kami meminta agar vaksin kedaluwarsa di provinsi tidak digunakan, meskipun secara teori masih bisa digunakan untuk perpanjangan waktu," tegas legislator dapil DKI Jakarta I itu. ● **ica/sf**



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI menyerahkan bantuan dari pemerintah kepada Pemprov Lampung.

berjuang pada masa pandemi Covid-19, ini bisa dimulai dari Lampung," kata Itet saat memimpin Kunspek Komisi IX DPR RI ke Lampung, Jumat (2/9).

Makam Pahlawan Kemanusiaan ini juga untuk

mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi.

"Sehingga masyarakat yang menghiraukan protokol kesehatan dapat segera sadar akan bahaya Covid-19," tutup Itet. ● **pdt/sf**



Syaiful Huda Desak Kemendikbud Ristek Tak Hapus Tunjangan Guru dalam RUU Sisdiknas

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI tidak menghapus tunjangan guru dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang akan diajukan oleh pemerintah. Menurut Huda, tunjangan itu harus dilanjutkan dalam RUU Sisdiknas demi perbaikan kesejahteraan guru.

Namun hingga kini, draf RUU Sisdiknas itu belum dikirim ke DPR RI, sehingga belum diketahui masuk dalam Prolegnas 2023 atau Prolegnas 2024. Demikian diungkapkan Huda saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi bertema 'RUU Sisdiknas dan Peta Jalan Pendidikan Nasional' bersama Pengamat Pendidikan Asep Sapaat dan Kadep Litbang PB PGRI Sumardiansyah, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (6/9).

"DPR belum terima draf revisi RUU Sisdiknas yang baru. Komisi X DPR hanya mengetahui polemik di masyarakat terkait tunjangan guru (dalam RUU Sisdiknas). Jadi, apakah RUU Sisdiknas itu masuk dalam Prolegnas tahun 2023 atau tahun 2024, kita belum tahu," tegas Huda.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, ketentuan tunjangan profesi guru memang dihapus dalam RUU Sisdiknas. Ia menyebut kemungkinan aturan tunjangan akan

”

DPR HANYA MENGETAHUI POLEMIK DI MASYARAKAT TERKAIT TUNJANGAN GURU (DALAM RUU SISDIKNAS).

mengikuti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Diganti, dikembalikan ke UU ASN dan UU Ketenagakerjaan. Artinya (ketentuan tunjangan) dihapus," kata Huda.

Dengan tegas, dirinya pun mengaku tidak setuju jika tunjangan profesi dihapus dari RUU Sisdiknas. Pasalnya, profesi guru berbeda dengan ASN, sehingga perlu diatur secara khusus. "Saya termasuk yang *enggak* setuju. Bayangannya *enggak* usah ada tunjangan profesi karena dalam UU ASN *enggak* ada tunjangan profesi, guru *enggak* ada," tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu. • hal/sf



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

FOTO: PRIMA/NVL

Scan QR untuk berita selengkapny





FOTO: EKI/ANAL

Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno saat memimpin Kunker BAKN DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

BAKN Dorong Penetapan Tarif Cukai Ringan untuk UMKM

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan tarif cukai ringan bagi perusahaan rokok kecil atau level Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mencegah menjamurnya peredaran rokok ilegal di masyarakat.

"Karena untuk bertahan saja mereka susah, apalagi kalau ditambah dengan beban cukai yang berat," kata Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno usai memimpin Kunjungan Kerja

BAKN DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/9). Untuk itu, Hendrawan mendukung usulan agar dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) digunakan untuk membuat kawasan industri hasil tembakau (KIHT).

Menurut Hendrawan, dengan adanya KIHT tersebut, nantinya perusahaan rokok kecil bisa dimasukkan dalam klaster KIHT dan mendapat pembinaan atau penyuluhan untuk penanganan permasalahan. "Nah kalau ini bisa dilakukan bagus, jadi DBHCT selain digunakan untuk mendirikan rumah sakit paru-paru, pemberdayaan petani tembakau,

juga digunakan untuk membuat klaster industri," terang Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu.

Selain menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal, Hendrawan juga menyoroti tentang banjir rob di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas pada Mei tahun 2022 lalu, yang menyebabkan sejumlah kerugian baik bagi perusahaan ekspor. "Ya, dari Pelindo tadi disampaikan sudah meningkatkan tanggulnya, melakukan pengurukan supaya lebih tahan. Ini kalau terus menerus terjadi tentu perusahaan-perusahaan ekspor akan lari," ujar Hendrawan lebih lanjut.

Hendrawan menambahkan, banjir rob merupakan salah satu dampak dari pemanasan global yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh negara-negara maju sekalipun. "Ini penanganannya harus secara global. PBB juga sudah membuat satgas dan lembaga-lembaga untuk mengatasi ini. Tinggal komitmen negara-negara di dunia untuk mengalokasikan anggarannya sehingga emisi karbon sampai (tahun) 2060 bisa ditekan seminimal mungkin," demikian pesan Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. • eki/sf

Scan QR untuk berita selengkapnya



BKSAP Upayakan Bahasa Melayu-Indonesia sebagai Bahasa Kerja di ASEAN



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: JIMAH/NVL

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat bertukar cenderamata dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Riau.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memimpin diskusi yang bertajuk 'Benchmarking Pembentukan Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Melayu-Indonesia'. Diskusi ini juga dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Sekda Provinsi Riau, akademisi Universitas Negeri Riau, Balai Bahasa Riau, dan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR).

Dalam diskusi ini, BKSAP DPR RI tengah mengupayakan wacana menjadikan bahasa Melayu-Indonesia sebagai bahasa kerja (working language) di IPU dan ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). "Kita ingin berangkat dari yang sifatnya regional baru ke internasional," ujar Fadli di Kantor

Gubernur Riau, di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (6/9).

Upaya mengusung Bahasa Melayu-Indonesia sebagai bahasa kerja di ASEAN cukup beralasan, hal tersebut karena terdapat kurang lebih 700 dialek Bahasa Melayu yang tersebar di beberapa negara, baik di dalam ASEAN sendiri maupun di beberapa negara yang memiliki fakta sejarah penyebaran budaya Melayu sejak era penjajahan.

Fadli mengungkapkan, bahasa Melayu pernah diajukan untuk menjadi bahasa PBB, namun kemudian kandas karena masih belum diputuskan dialek Melayu manakah yang akan dijadikan standar. Tidak ditemukan kendala substansi terkait bahasa Melayu standar sebagai lingua franca karena kawasan ASEAN pada umumnya berakar dari rumpun Nusantara.

Secara historis bahasa Melayu sudah menjadi bahasa yang memengaruhi Nusantara termasuk di Jawa dengan ditemukan enam prasasti berbahasa Melayu. Ini juga bukti bahwa Bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan (lingua franca) di Nusantara. Bahkan pihak kolonial menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di Nusantara.

Secara ilmiah dan obyektif bahwa bahasa Melayu Riau adalah bahasa Melayu standar. Hal tersebut didasarkan atas eksistensi Raja Ali Haji sebagai linguis pertama bahasa Melayu dan fakta sejarah bahwa Pulau Lingga kerap kali dikunjungi oleh banyak pihak di kawasan. Hasil keputusan sementara ditetapkan bahwa bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia terutama karena eksistensi Raja Ali Haji sebagai linguis Melayu pertama. ● **ssb/aha**

BURT DPR Apresiasi Peningkatan Fasilitas Kesehatan Eka Hospital BSD

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengapresiasi perkembangan pembangunan dan penyediaan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit (RS) Eka Hospital Bumi Serpong Damai (BSD). Salah satunya, dengan menyiapkan RS baru berupa *Cancer Center* yang akan menjadi rumah sakit khusus kanker pertama milik swasta. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (7/9).

"Kita melihat Rumah Sakit Eka Hospital ini adalah salah satu rumah sakit yang memang direkomendasikan di Indonesia. Di

sini memiliki banyak keistimewaan, ada penanganan tulang, ada untuk jantung, ada diabetes, dan bahkan akan membuat rumah sakit khusus kanker yang ada di BSD. Selain itu, Eka Hospital juga ada di beberapa provinsi di Indonesia. Targetnya beberapa tahun akan membuka, dan kita melihat memang pantas untuk menjadi rumah sakit rujukan (peserta Jaminan Kesehatan Utama/Jamkestama)," ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

Usai memimpin pertemuan Tim Kunker BURT dengan manajemen Eka Hospital BSD, Novita juga meminta agar Eka Hospital BSD dapat melayani masyarakat secara umum, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurutnya, fasilitas kesehatan yang baik

seharusnya tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah.

"Kita datang ke sini (Eka Hospital) juga berharap bahwa rumah sakit ini bisa melayani peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, melayani masyarakat yang menengah ke bawah. Dengan pelayanan yang bagus, kalau masyarakat menengah ke bawah bisa ikut berobat ke sini dengan harga yang kita harapkan juga terjangkau, tentu bisa membantu masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik juga," ujar Novita menutup pernyataannya.

Dalam kesempatan yang sama, Hospital Director Eka Hospital BSD Dr. Albertus Eka Budi Sutanta mengungkapkan bahwa khusus untuk Eka Hospital BSD akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan saat selesai melakukan renovasi pada tahun 2024 atau 2025. Direncanakan renovasi tersebut akan menampung sekitar 400 *bed*, yang mana sebagian besar akan dialokasikan untuk peserta BPJS Kesehatan. • uf/sf

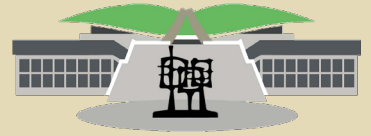


FOTO:UBAID/ANIL

Foto bersama Tim Kunker BURT DPR RI dengan manajemen Eka Hospital BSD.

Scan QR untuk berita selengkapnya





Pimpinan Komisi I DPR RI saat foto bersama Menkominfo Johnny G. Plate usai menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk dibahas pada tingkat Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9). FOTO: JAKA/NVL



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat diskusi bertajuk BKSAP SDGs Day 'Optimalisasi Diplomasi Soft Power Parlemen Melalui Dunia Pendidikan dan Pertukaran Budaya' di Universitas Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (1/9). FOTO: AYU/NVL

BKSAP SDG'S DAY:
"OPTIMALISASI DIPLOMASI
SOFT POWER PARLEMEN MELALUI
DUNIA PENDIDIKAN DAN
PERTUKARAN BUDAYA"



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat membuka kegiatan program 'Magang di Rumah Rakyat', di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (5/9). FOTO: JAKA/NVL

